

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. DWI ASTUTININGSIH
Alamat : Jln. Serayu No. 16 C RT 002 RW 002
Kelurahan Kedungjenar Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jabatan : Calon Bupati Blora No Urut 1

Dengan ini memberikan Kuasa sepenuhnya kepada :

Nama Penyelenggara : KPUD Kabupaten Blora
Alamat : Jln. Halmahera No. 11 Kecamatan Blora
Kabupaten Blora

untuk mengumumkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Dra. DWI ASTUTININGSIH kepada masyarakat umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blora , 8 Oktober 2020

Yang memberi Kuasa,



Dra. DWI ASTUTININGSIH



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
SUB UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI ASTUTININGSIH
2. Jabatan : ANGGOTA DPRD
3. NHK : 535119

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 575 m ² /50 m ² di BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m ² /80 m ² di BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	489.000.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA PENUMPANG Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	182.197.635
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.871.197.635
iii. HUTANG	Rp.	810.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.061.197.635

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **30 Juni 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.